

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Organisasi pemerintahan merupakan perkumpulan yang penting dalam pemerintahan karena berkaitan dengan jalannya pemerintahan dan kemajuan negara. Untuk mencapai tujuan dan targetnya, keterampilan pekerja yang luar biasa yang menjadi penghibur peraturan adalah sesuatu yang penting yang perlu dipertimbangkan. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang berkontribusi di dalamnya harus dapat melaksanakan tugas pokok dan manfaatnya secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini. mencapai tujuan yang ditetapkan oleh otoritas publik.

Salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, saat kita memasuki era globalisasi adalah Ini mengacu pada bagaimana menghadirkan perlengkapan profesional, memiliki etos kerja yang kuat, memiliki keunggulan dibandingkan pesaing, dan terampil dalam menjalankan tanggung jawab. dan tanggung jawab, serta memenuhi aspirasi rakyat dan bebas dari belenggu Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Kenyataan bahwa secara empiris masyarakat di daerah menginginkan aparatur pemerintah bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugasnya, yang pada akhirnya dapat memberikan pelayanan dan pembangunan yang terbaik bagi masyarakat, menjadi alasan tantangan ini.

Organisasi pemerintahan adalah suatu kerangka kerja yang terorganisir dan teknik atau tata cara dalam melaksanakan strategi pemerintahan, khususnya yang terletak pada administrasi publik. Selain itu juga dapat menghasilkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat dengan birokrasi yang berfungsi dengan baik. Namun, muncul persoalan dalam pelayanan publik yaitu banyak pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang di bawah standar. Hal ini karena birokrat mengintegrasikan pekerjaan mereka dengan situasi politik di tempat kerja mereka, mencegah profesionalisme layanan dan masalah tidak disampaikan administrasi ke kepada badan publik daerah. Keadaan ini menjadi bahan penilaian badan publik terhadap Teknik atau tata cara yang dilakukan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah harus lebih mengembangkan pemahaman tentang peran yang dimainkan oleh birokrasi dalam pelayanan publik untuk memaksimalkan pelayanan publik. Hal ini akan memastikan sistem birokrasi tumbuh secara profesional dan fokus pada pelayanan publik. (Suhendar, 2021; Sarumaha, 2017; Amrullah et al., 2021; Pulungan, 2011; Mujiburrahman, 2011).

Terkait layanan masyarakat yang disediakan, pemerintah daerah sering mengajukan perubahan kepada pejabat pemerintah dalam bidang pembangunan daerah, khususnya dalam hal kualitas atau tingkat pembangunan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah terhadap masyarakat. Hal yang sering menjadi permasalahan dalam hubungan masyarakat dengan pemerintah di daerah adalah masyarakat sebagai penyedia jasa (*service provider*), pemerintah yang berkewajiban untuk memajukan masyarakat dan pembangunan daerah. Terlebih dalam menghadapi persaingan di era globalisasi, kualitas pelayanan pemerintah

akan menghadapi tantangan yang semakin berat untuk meningkat dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Isu birokrasi primer merupakan salah satu poin penting dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025. Persoalan utamanya adalah SDM aparatur negara belum cukup berbuat untuk meningkatkan profesionalisme dan tingkat produktivitas, serta kinerja aparatur pemerintah yang masih sangat rendah. Tujuan dari perubahan administrasi itu sendiri adalah untuk memperluas batas dan tanggung jawab pelaksanaan peraturan. Profesionalisme dan motivasi tidak terlepas dari faktor pendukung dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab dan tugas pokok pemerintah, yaitu sebagai berikut: pembangunan (development), pemberdayaan (empowerment), dan pelayanan (service).

Pada saat yang sama, permintaan lokal untuk peningkatan kualitas terkadang meningkat. Kesadaran akan fakta bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Paragraf pertama pasal 258 UU No. “Daerah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah,” bunyi pasal 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Pasal di atas menunjukkan bahwa DPRD setempat harus memiliki opsi untuk menyelesaikan perbaikan wilayah sebagai hak daerah yang harus dipenuhi. Akibatnya, dibutuhkan pegawai pemerintah daerah untuk keahliannya. sehingga pemahaman tentang profesionalisme berdasarkan kinerja individu, kelompok, dan

organisasi diadakan di setiap posisi penting untuk menghasilkan kinerja karyawan secara keseluruhan.

Eksekusi representatif yang dimaksud adalah penyempurnaan dari nilai kerja, peluang ideal yang digabungkan dengan kualitas dan kuantitas yang tercipta sesuai target yang telah ditetapkan. Bila mengacu pada hasil pekerjaan yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan hasil yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan suatu pekerjaan dianggap telah memenuhi standar yang sesuai. Seperti yang ditunjukkan oleh Mahsun (2009:63), kinerja pegawai merupakan cerminan dari wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi. termasuk pegawai di Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai sarana untuk mendapatkan wawasan dan fokus terhadap permasalahan yang dihadapi, tarik tambang harus menggunakan pendekatan yang seimbang dengan penekanan pada penerapan prinsip saling ketergantungan. Langkah kedua dalam proses representatif yang telah didemonstrasikan ini adalah memilih tindakan yang paling tepat untuk individu dan periode waktu yang telah ditentukan yang sesuai untuk jenis kualitas dan/atau kuantitas. Mahsun (2009: 63) mengatakan bahwa penggunaan representasi merupakan tanda kekuasaan, tanggung jawab, dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan yang ditunjukkan oleh Himpunan Pegawai di Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.

Bappedalitbang, juga dikenal sebagai Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pembangunan Daerah, adalah badan yang bertugas membantu Wakil Pemimpin dalam penyiapan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan

proyek inovasi dan rencana kemajuan daerah. Organisasi ini berada di bawah prakarsa Sekda dan bergantung pada perwakilan Pimpinan.

Dikutip dari KaltengTimes, Sekretaris Direktorat Jenderal Peralihan Provinsi, Sri Purwaningsih, SH., M.AP menyampaikan isu perdebatan dan asumsi terkait pemaparan Rencana Perbaikan Wilayah Pemerintah Provinsi tahun 2023. Acara tersebut mengambil bertempat di Balai Rancangan Akhir RKPD Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 22 Juni 2022. Dikatakannya, RKPD Kalteng harus memiliki cetak biru yang sama dengan rencana penyempurnaan dari Masyarakat sebenarnya.

Dr. H. Kaspinor, SE, membawahi Bappedalitbang Wilayah Kalimantan Tengah. “Dengan proses yang sesuai dengan mekanisme pembahasan rencana program pembangunan ini, kami berharap ada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah,” ujar Kaspinor. Selain itu, beliau menyampaikan masukan lain yaitu bagaimana Kalteng mampu mendongkrak dan meningkatkan potensinya sehingga dapat memperoleh rencana pembiayaan kegiatan program. M.Si menyampaikan masukan atas kegiatan tersebut agar tercipta sinergi antara program yang dijalankan oleh pemerintah pusat dengan yang dijalankan oleh pemerintah daerah Yang terpenting adalah bagaimana Kalimantan Tengah dapat mengembangkan inovasi kerja dan birokrasi ke depan agar dapat beradaptasi dengan era digital, tempat kerja yang profesional dan bernilai tambah yang dapat bekerja dengan pengaturan, kecepatan, dan ketepatan serta menghindari ancaman yang signifikan terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Tuntutan – tuntutan ini tak terlepas dari isu – isu strategis pembangunan yang telah diungkapkan sebelumnya. Dikutip dari kalteng.kemenkumham.go.id, dalam kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kalimantan Tengah tahun 2023 disampaikan isu – isu strategis yang telah disepakati Bappenas-Bappeda yaitu: rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan produksi serta pelayanan publik dan pemerintahan daerah, kurang tanggap terhadap bencana akibat penggunaan sumber daya alam yang tidak terkendali, kurang tanggap terhadap dampak Pandemi Covid-19, kurang berkembangnya daerah sentra produksi pangan, pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam yang belum memadai, pemenuhan layanan dasar, infrastruktur dasar, dan konektivitas yang belum memadai, respon yang belum memadai terhadap dampak Pandemi Covid-19.

Kedudukan, rancangan kewenangan, kewajiban, tata kerja dan tata kerja Badan Penataan Pembinaan Provinsi, Eksplorasi, dan Pemprov Kaltim dituangkan dalam Pedoman Pembinaan Pembinaan Pemprov Kaltim Nomor 55 Tahun 2016. Penjelasan tentang Pembinaan dan Penilaian Pembinaan Wilayah dimuat dalam Pasal 20, khusus: “Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan, disusun melalui Evaluasi Bidang dan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut, jelaslah bahwa Badan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sangat berperan dan berdampak besar terhadap penataan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. ASN dan

perwakilan pemerintah di dalamnya, yang merupakan penggerak utama di balik organisasi otoritas publik, tentunya memiliki komitmen yang besar sehingga pelaksanaan merupakan titik sentral yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan dan melakukan kemampuan dan pelaksanaan yang efektif dari pemerintah daerah.

Agar penataan kinerja di Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah berhasil dan efisien, perlu dikembangkan dan ditetapkan sistem dan prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas, dan nyata. Ini semua tentunya tidak lepas dari apa yang telah diungkapkan dalam Pergub Kaltim Tahun 2016 Nomor 55 dan prinsip-prinsip pelaksanaan pengaturan tersebut.

Mengingat pentingnya peningkatan kinerja pemerintah daerah Kalimantan Tengah sebagai bentuk efisiensi dan inovasi kerja dalam menghadapi tantangan – tantangan dan permasalahan pembangunan daerah Kalimantan Tengah. Beberapa masalah yang di hadapi sekarang yaitu daerah yang memiliki hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah sebagai penyedia jasa (*service provider*) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pembangunan yang semakin berkualitas.

Adanya tuntutan-tuntutan tersebut yang di sampaikan oleh sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng diharapkan agar pemerintahan Kalteng bisa memenuhi tuntutan atas isu – isu strategis pembangunan yang di hadapi sehingga kedepannya membutuhkan prosedur dan sistem kerja yang cepat, tepat, jelas, nyata, dan akuntabel, serta peraturannya. Berdasarkan permasalahan yang di hadapi pemerintah Kalimantan

Tengah penting dilakukannya kajian ilmiah yang berjudul **“PENINGKATAN KINERJA BIDANG EVALUASI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kinerja bidang evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan membedah peningkatan pelaksanaan dalam penyusunan dan penilaian kemajuan daerah di Wilayah Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna dalam hal:

1. Dalam pelaksanaannya, diharapkan pemerintah dan masyarakat umum, khususnya pegawai, dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai bahan masukan dan referensi di BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Secara teoritis, diharapkan temuan penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dengan mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkontribusi bagi pertumbuhan bidang administrasi publik dan ilmu

politik, berfungsi sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang membutuhkannya, dan dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang profesionalisme birokrasi.